

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan dimana daerah diberikan kewenangan otonomi secara luas dalam mengatur dan melakukan pengurusan pemerintahan dalam kerangka NKRI (Akbal, 2016). Kinerja pemerintah daerah (pemda) menjadi salah satu kunci dari faktor keberhasilan suatu organisasi untuk memastikan kepuasan pelayanan publik dan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Aswar, 2019). Hal tersebut tentunya memerlukan hak untuk mengatur dan mengurus suatu daerah. Hak tersebut merupakan kekuasaan yang besar sekaligus memikul tanggung jawab yang berat, terutama jika masalah tersebut masuk ke ranah keuangan. Tidak heran bahwa peran Sistem Pengendalian Internal (SPI) perlu diperhatikan dalam otonomi daerah. SPI tentunya memiliki keahlian dalam pencegahan hilangnya sumber daya dalam sebuah kelompok sebagai dampak dalam perilaku curang. (Amiseno, 2019)

*“Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)”* mendefinisikannya pengendalian internal ialah proses dimana mendapat pengaruh dari direktur, manajemen, entitas personel lainnya yang perancangannya bertujuan dalam memberikan rasa yakin terkait pencapaian dengan maksud yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan (Yaya & Supobo, 2019). PP Nomor 60 2008 menjelaskan bahwa SPI ialah tindakan yang teratur yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan semua karyawan sampai terpenuhinya kejelasan dan maksud dari perusahaan berupa kegiatan yang efektivitas dan efisiensinya terjamin, kehandalan dalam laporan keuangan, pengamanan kekayaan yang dimiliki negara, serta rasa taat pada peraturan perundangan yang berlaku (Saferi & Mulyani, 2020).

Penjelasan yang senada dipaparkan oleh Amiseno (2019) bahwa SPI ialah deretan atau gabungan atas aturan yang telah dibuat supaya manajemen memperoleh suatu rasa yakin dalam pencapaian tujuannya dan sasaran organisasi.

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS**

**PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19**  
*(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Sistem Pengendalian internal (SPI) tentunya dibuat agar dapat melakukan pendeteksian ada tidaknya kelemahan yang nantinya dapat menjadi penyebab permasalahan pada proses pengendaliannya yang mencakup : 1) kelemahannya pada sistem pengendalian pada perhitungan pelaporan serta juga akuntansi, 2) kelemahannya pada pelaksanaannya sebuah anggaran belanja serta pendapatan, 3) kelemahannya terkait pada stuktur pengendalian internal (Samhah & Handayani, 2018). Namun, walaupun dengan adanya Sistem Pengendalian internal (SPI), otonomi daerah di Indonesia yang terbilang memiliki kekuasaan yang besar masih saja mengalami kelemahan dalam pengendalian internalnya.

Berdasarkan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) *Fraud Survey 2006* yang merupakan jaringan terkait jasa berbasis professional multinasional serta termasuk dalam organisasi akuntansi besar di dunia, telah ditemuinya faktor yang menjadi alasan terdapatnya kecurangan yakni lemahnya pengendalian internal sejumlah 33% dari total kasus yang ada. Faktor lainnya yang ditemukan pada survei 2006, yakni adanya rasa abai pada sistem pengendalian internal dengan jumlah 24% dari total kasus yang ada (Alawiyah & Sumardjo, 2020). Karena hal tersebutlah pengendalian pada sistem organisasi sangat dibutuhkan dalam penanggulangan adanya kecurangan. Tentunya, kasus-kasus yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal sering terjadi karena kecurangan akuntansi yang berujung pada korupsi. Perilaku yang biasanya dilakukan dalam hal korupsi yakni melakukan pemalsuan catatan, mengapus dokumen, serta *mark-up* yang merugikan nilai ekonomi serta keuangan negara (Agustini & Astika, 2021).

Kecurangan tersebutlah yang merupakan akar dari lemahnya pengendalian internal yang didefinisikan sebagai kelemahan yang ditemui secara signifikan pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realita dimana tidak dapat dilakukan pendeteksian (Gumilan & Putra, 2019). Didapati kelemahan SPI dibagi menjadi tiga, yaitu pelaksanaannya pendapatan, kelemahannya pada sistem pengendalian, serta belanja dan juga struktur dari pengendaliannya internal (BPK-RI, 2010 dalam (Mustafa & Mahyus, 2017)). Maka dari itu juga pengendalian internal memiliki peran yang penting bagi suatu perusahaan termasuk pemerintah daerah dalam

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS**

**PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

melakukan koordinasi dan pengawasan terjadinya suatu *fraud*. Esensi penggunaan pengendalian internal berlandaskan atas perbedaan sumber informasi antara publik dengan pemerintah daerah dimana pemda berperan menjadi sumber informasi yang baik dibanding publik sehingga akan lebih berpeluang dalam melakukan upaya kecurangan (Mughtar & Lestari, 2018).

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, Sistem Pengendalian internal (SPI) terutama ranah keuangan masih terbelah jauh dari pada harapan. Perihal demikian dibuktikannya dari pada pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) rawan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Beberapa diantara kecurangan tersebut adalah temuan bantuan sosial yang salurannya tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan kepalsuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Kecurangan bukan hanya datang dari faktor internal saja namun faktor eksternal. Akhir-akhir ini Indonesia bahkan seluruh dunia digemparkan oleh virus COVID-19 yang tengah menyebarluas hingga memukul rata perekonomian dunia. Virus COVID-19 ini terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu. Menurut situs WHO, COVID-19 termasuk dalam virus yang bisa menular kepada binatang maupun manusia. Terhadap manusia, virus ini dapat menjadikan terganggunya saluran pernapasan dimulai dari flu sampai dengan penyakit dengan gejala yang cukup parah layaknya “*Severe Acute Respiratory Syndrome*” (SARS) dan “*Middle East Respiratory Syndrome*” (MERS). Adanya penyebaran bibit penyakit ini menjadikan pemerintah pusat dan daerah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menghentikan penularan virus. Beberapa kebijakan diantaranya adalah *social distancing* dan batas waktu operasional perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diiringi dengan berbagai bantuan yang datang secara langsung dan tidak langsung dari pemerintah berupa anggaran atau benda. Sebelum adanya pandemi sudah ditemukan kecurangan yang terjadi, salah satunya diduga karena SPI yang masih tergolong lemah, dana anggaran yang diberikan dari pemerintah pada Pemda Per November 2019, dibuktikan masih mengendap dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), KEMENKEU telah mencatat terdapat dana yang mengendap di RKUD

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS**

**PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19**  
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

dengan total sebesar Rp 186 Triliun. Dana yang mengendap tersebut tentunya sangat mencurigakan hingga Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menyatakan bahwa KEMENKEU akan melakukan pemotongan alokasi dana bagi daerah yang melakukan penundaan terkait penyaluran dana. Sebagai suatu informasi, dana daerah mencakup beberapa alokasi dimana terdiri dari sebuah perimbangan, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang selanjutnya terdapat juga dana otonomi khusus dan juga dana insentif daerah serta keistimewaan. Hal ini sangat disayangkan, karena rakyat yang dipimpin daerah otonomi tersebut harus menanggung beban yang anggarannya dipotong karena kelalaian pemda dalam mengatur keuangannya ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sudah melakukan pencatatan terkait realisasi anggaran belanja Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) pemda periode 2021 sampai dengan bulan kelima sebesar Rp 43,8 triliun. Hal ini tentunya patut dicurigai karena jumlah itu sekitar 8% dari anggaran Rp 586,1 triliun yang telah dipublikasikan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Dinyatakan bahwa jumlah PBJP pemda 2021 hingga Rp 606,6 triliun. Sedangkan sampai 17 Mei 2021, tersisa 3% bujet yang belum diumumkan dalam SiRUP ([insight.kontan.co.id](http://insight.kontan.co.id)).

Kasus menggemparkan mengenai kelemahan pengendalian internal juga ditemukan di lingkungan kementerian sosial yang dilakukan oleh menteri sosial yang sedang menjabat saat itu yaitu Juliari Batubara. Juliari pada saat itu menunjuk Matheus dan Adi untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek bantuan sosial. Dalam perbuatan suap terhadap bantuan sosial tersebut Juliari menerima uang suap dengan total sebesar Rp 17 Miliar ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)).

Selain itu, kasus mengenai kelemahan pengendalian internal terjadi juga di Jember, yakni terkait kasus pejabat di lingkungan Pemkab Jember dan Bupati Jember, Hendy Siswanto yang mana dikabarkan menerima honor terkait pemakaman warganya yang meninggal dikarenakan COVID-19 yang kemudian

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

***PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS***

***PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19***

***(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

adanya berita ini banyak mendapatkan kritik dan kecaman. Diduga, telah terdapat adanya aliran dana honor senilai Rp 282 Juta kepada beberapa kepala daerah serta pejabat yang telah lolos dari pengawasan ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Sebelum berita yang menyangkut nama bupati Jember muncul, didapati pemberitaan beberapa pejabat pemkab Jember mendapat sejumlah uang senilai Rp 70 juta lebih sebagai tim pemakaman jenazah penderita COVID-19 Kabupaten Jember yang jumlahnya mencapai 705 jenazah. Ini dapat teridentifikasi melalui kode rekening 5.1.02.04.01.0003 tertanggal bulan Juni 2021, dimana total anggaran yang diterima oleh empat pejabat yang bersangkutan mencapai Rp 282 Juta ([www.nasional.tempo.com](http://www.nasional.tempo.com)). Tentunya ini merupakan kasus pelanggaran dana pemerintah yang terjadi karena lemahnya pengendalian internal yang patut diperhatikan. Kasus ini secara tidak langsung menolak pernyataan dari *International Federation of Accountants* yang menyatakan bahwa untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah, penting bagi pemerintah memaparkan informasi yang jelas, lengkap dan keakuratannya dapat dipercaya tentang pengeluaran dan transaksi, untuk menunjukkan akuntabilitas dan pengelolaan, dan untuk memperkuat kredibilitas mereka sendiri (Fitri, Ferdous, & Khalidah, 2019).

Banyaknya kasus mengenai kecurangan Sistem Pengendalian internal (SPI) memicu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan himbuan kepada semua kepala daerah untuk lebih bijaksana dalam mengalokasikan dana pemerintah daerah untuk menangani kasus COVID-19 di daerahnya secara tepat tanpa adanya intruksi dari pemerintah pusat secara langsung. Banyaknya daerah yang sudah mendapatkan surat teguran dari Kemendagri menyatakan kecurigaan pemerintah terhadap kelemahan Sistem Pengendalian internal (SPI) saat ini. Daerah yang mendapatkan surat teguran tersebut selain Jawa Barat adalah Aceh, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Barat dan Tengah, NTB, Yogyakarta, Bengkulu, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Tengah, Sumatera Selatan, Riau dan Papua ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS**

**PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Fenomena-fenomena yang telah dijabarkan diatas menyimpulkan pernyataan bahwa kelemahan sistem pengendalian daerah masih tergolong kasus yang baru dan diasumsikan bisa dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan asli daerah (PAD), serta ukuran entitas pemda (*Size*) karena surat teguran yang ditunjukkan oleh Kemendagri adalah daerah-daerah yang memiliki kekuasaan besar dan ekonomi yang terbilang maju.

Daerah kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya terdapat dukungan terkait perkembangan adanya investasi modal swasta dan pemerintah serta diikuti dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakatnya, dimana semua hal tersebut tentunya harus mendapat ketepatan dalam alokasi belanja pemerintah, sistem birokrasi yang mendukung dan tidak rumit serta regulasi yang juga mendukung terkait adanya investasi (Majid, 2017). Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan pada bidang ekonomi jika tingkat aktivitas perekonomiannya termasuk kategori lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelum itu. Kegiatan ekonomi biasanya didapatkan melalui sejumlah sektor antara lain pertanian, industri tambang, hingga penawaran jasa (Iqbal, 2017). Semakin bertumbuhnya ekonomi suatu daerah maka sistem pengendaliannya semakin memiliki kelemahan (Iqbal, 2017). Pernyataan yang sama dinyatakan oleh Majid (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi secara signifikan pada lemahnya pengendalian internal pada suatu daerah.

Pembangunan dan kemajuan wilayah dipengaruhi oleh keahlian dari suatu wilayah dikala melaksanakan pengelolaan pada sumber kekayaan wilayah tersebut, penyebabnya yakni sebab keuangan wilayah yang bersumber dari PAD memiliki keuntungan dibandingkan dengan yang lain. Sebab perihal tersebut PAD diucap pula selaku tumpuan dari pendanaan pemda. (Saferi & Mulyani, 2020). PAD berpengaruhnya dengan cara yang signifikan positif terhadap adanya kelemahan terkait pengendaliannya internal di Perda. Besarannya PAD bisa dijadikan suatu celah bagi para pengelola untuk melakukan hal kecurangan pada pengelolaan dana daerah dimana ini menjadikan SPI tidak berjalan semestinya dan menjadikan sistem pengendalian internal di suatu pemda akan mengalami peningkatan (Alawiyah &

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

***PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS***

***PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19***

***(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Sumardjo, 2020). Hal tersebut senada dengan penelitian dari (Majid, 2017) dimana ia menyatakan PAD memiliki dampak positif bagi kelemahan pengendalian daerah begitu juga didapati hasil yang sama dengan penelitian Veronica, Fachruddin, & Natigor (2018) dimana mengungkapkan PAD memiliki efek yang positif signifikan pada kelemahannya sistem yang terkait pada pengendalian internal.

Ukuran Entitas Pemda ialah deskripsi dari besar kecilnya organisasi pemerintahannya (Khairana, 2018). Jumlah aset yang dipunya pemda secara tidak langsung menjadikan manajemen pemda agar dapat semakin mengoptimalkan pemantauan atas aset pemda tersebut. Pemda berupaya guna mengelolakan dan memantau asetnya tersebut, agar terdapat penurunan angka kecurangan yang terjadi, oleh karena itu total aset bisa digunakan sebagai alat ukur ukuran pemerintah dalam penelitian ini (Saferi & Mulyani, 2020). Entitas yang dipunya berukuran besar dimana mempunyai kondisi perekonomian berkecukupan juga dalam SPII yang lebih layak dikarenakan kecukupan hal tersebut akan meningkatkan pengendalian internal (Khairana, 2018). Penelitian dengan hasil yang sama didapatkan oleh Iqbal (2017) bahwa ukuran pemda berpengaruh secara signifikansi pada kelemahan terkait pada pengendalian internal.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern (KPI) di pemda dengan mempertimbangkan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, serta ukuran entitas pemda dan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pengendalian intern yang ada saat pandemi COVID-19 juga dapat dipergunakan sebagai bentuk perbandingan antara kelemahan pengendalian intern sebelum pandemi COVID-19 maupun ketika terjadi pandemi COVID-19.

Berdasar uraian yang telah dijabarkan maka peneliti berniat melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Ukuran Entitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian internal saat Pandemi COVID-19 (Studi kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)”**

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

***PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS***

***PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19***

***(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan:

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19?
2. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19?
3. Apakah ada pengaruh entitas pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal saat pandemi COVID-19?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan penelitian mencakup :

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal disaat pandemi COVID-19S
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian internal disaat pandemi COVID-19
3. Untuk menganalisis pengaruh entitas pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal disaat pandemi COVID-19

## 1.4 Manfaat hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai wacana dalam ilmu ekonomi, sekaligus memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal.
  - b. Dapat menambah informasi ilmiah yang dijadikan referensi dalam kajian penelitian berikutnya dengan topik yang sama.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Entitas

Penelitian ataupun riset ini diharap bisa memberikannya sebuah pesan ataupun informasi yang berfungsi guna membantunya pemerintah

**Fakhry Seftian Pasha, 2022**

***PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN UKURAN ENTITAS***

***PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL SAAT PANDEMI COVID-19***

***(Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Jawa dan Bali)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



daerah dalam meningkatkan sistem pengendalian internalnya di saat pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat menekan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern dimasa mendatang

b. Bagi Institusi

Pemerintah daerah di pulau Jawa dan Bali dapat memanfaatkan informasi dalam penelitian ini untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang sudah ada sebelumnya dan juga dapat dijadikan acuan sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dalam institusi tersebut.

c. Bagi pihak lain

Bisa dipergunakan menjadi studi kepustakaan serta menambah pengetahuan untuk pengembangan penelitian yang masih berkaitan.